

PERAN KOPERASI MULTI PIHAK DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN LOKAL DI INDONESIA

Ama Dea ¹⁾, Amanda Salsa Billa ²⁾, Sabrina Salsabilla³⁾, Zahra Aulia Nissa⁴⁾

^{1) 2) 3) 4)} Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kramat Raya No. 98, Jakarta Pusat, Indonesia

Correspondence			
Email: deaa121118@gmail.com		No. Telp: 089643042437	
Submitted 13 November 2024	Accepted 18 November 2024	Published 19 November 2024	

ABSTRACT

Koperasi multi pihak merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi yang mencakup berbagai faktor seperti produsen, konsumen, pekerja, dan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi multi pihak dalam mendorong perekonomian lokal di Indonesia serta pengentasan kemiskinan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan koperasi multi pihak. Hasilnya menunjukkan bahwa koperasi multi pihak mampu mendorong partisipasi ekonomi yang inklusif, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan sektor swasta diperlukan untuk memaksimalkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan

Kata kunci: Koperasi Multi Pihak; Koperasi di Indonesia; Peran Koperasi dalam Ekonomi Lokal

Pendahuluan

Sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang bertujuan untuk menggunakan sumber daya ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Karena sumber daya ekonomi terbatas, koperasi harus fokus pada kepentingan anggotanya. Koperasi perlu bekerja secara efisien dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan aturan ekonomi. Kerja sama dalam koperasi didasarkan pada kesetaraan dan kesadaran anggota. Koperasi adalah tempat di mana anggota dan pengurus bekerja sama untuk mengelola organisasi dan usaha sesuai dengan keinginan anggota melalui rapat musyawarah (Purnamawati, 2020a). Menurut PSAK No. 27 Pada tahun 2007 (dalam Purnamawati, 2020b), koperasi memiliki ciri khusus yang membedakannya dari badan usaha lain, yaitu anggota koperasi mempunyai identitas ganda sebagai pemilik dan pengguna layanan koperasi, oleh karena itu koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung karena memiliki setidaknya satu kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi dibangun dan dikelola berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk membantu dan bertanggung jawab pada diri sendiri, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Anggota koperasi juga meyakini pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Koperasi dibentuk, didanai, dibiayai, diatur, dan diawasi oleh anggotanya sendiri. Tugas utama badan usaha koperasi adalah mendukung kepentingan ekonomi anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Jika koperasi memberikan layanan yang berlebihan kepada anggotanya, layanan tersebut dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Dengan berkembangnya perekonomian dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, muncul model koperasi yang lebih responsif, yaitu koperasi multipihak. Koperasi multipihak atau sering disebut sebagai multi-stakeholder cooperatives adalah jenis inovasi kelembagaan yang memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok untuk bersatu dalam satu badan organisasi. Diharapkan kerjasama dari berbagai kelompok dalam koperasi ini dapat membuka pintu menuju peluang pasar yang lebih luas, memperkuat rangkaian nilai, serta mendukung peningkatan keterlibatan ekonomi di sejumlah sektor, terutama dalam

perekonomian lokal (Lesmana & Widyaiswara, 2022).

Koperasi memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia dengan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan mendistribusikan keadilan. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia penting karena dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Melalui koperasi, orang-orang bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah ekonomi, mendapatkan akses keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama (Nasution et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bertujuan untuk memahami isu yang diteliti melalui analisis berbagai sumber referensi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai jenis referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dianggap efektif karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Proses analisis dalam studi literatur dilakukan dengan membaca, memilah, dan menyusun informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mencapai kesimpulan yang kuat dan komprehensif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengaitkan temuan dari literatur dengan teori yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai isu yang diteliti. Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut atau pengembangan teori yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Model Multi-Stakeholder Cooperative (MSCs) adalah model yang menggunakan modal sosial sebagai dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, kepemilikan terbuka membolehkan banyak pihak memiliki saham, seperti individu, organisasi, pekerja, produsen, konsumen, anggota komunitas, investor, dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi multi pihak dalam mendorong perekonomian lokal di Indonesia. Berikut adalah hasil dari analisa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur.

1. Koperasi Multi Pihak

Pada dasarnya, koperasi memiliki anggota dari satu kelompok kepentingan, misalnya koperasi produsen dimiliki oleh produsen, koperasi pekerja dimiliki oleh pekerja, koperasi konsumen dimiliki oleh konsumen, dan sebagainya. Koperasi multi pihak adalah koperasi yang dimiliki dan dikendalikan lebih dari satu jenis keanggotaan, seperti konsumen, produsen, pekerja, relawan, atau pendukung masyarakat. Pihak yang berkepentingan bisa berupa orang atau organisasi seperti lembaga nirlaba, bisnis, pemerintah, atau koperasi lainnya (*Multi-Stakeholder Cooperatives*, n.d.).

Koperasi Multi Pihak (KMP) resmi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 tahun 2021 (PMKUKM/8/2021 et al., 2021). Model ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi perekonomian modern dan didasarkan pada prinsip kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, produsen, pekerja, dan investor. Koperasi multi pihak juga dikenal dengan istilah lain seperti koperasi multi-stakeholder (MSCs) dan koperasi solidaritas, yang menekankan pada kerja sama dan kepentingan bersama dari berbagai kelompok konstituen. Koperasi multipihak

mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan membina kerjasama antar kelompok yang berbeda. Model ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan menggunakan sumber daya secara lebih efektif. Dengan memperkuat kerja sama di antara para anggotanya, koperasi-koperasi ini tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga nilai sosial, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Admin, 2022).

KMP berperan penting dalam mengatasi tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Dengan mengintegrasikan beragam perspektif dan kepentingan, koperasi-koperasi ini dapat merespon kebutuhan lokal dengan lebih baik dan mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan. Hal ini menjadikan KMP solusi yang tepat untuk membangun perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan di zaman modern. KMP juga membantu memperkuat keberlanjutan perekonomian daerah. Dengan mengedepankan prinsip kerja sama seperti partisipasi dan solidaritas, model ini mendorong anggota untuk bekerja sama mengatasi tantangan ekonomi yang mereka hadapi. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, anggota koperasi dapat saling mendukung secara finansial dan memberikan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, KMP berfungsi sebagai alat untuk mencapai manfaat ekonomi dan juga sebagai jaring pengaman sosial yang meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan.

2. Peran Koperasi Multi Pihak dalam Perekonomian

Koperasi Multi Pihak (KMP) di Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian lokal dengan melibatkan berbagai elemen, seperti petani, pengusaha kecil, dan masyarakat. Melalui kerja sama ini, koperasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan daya tawar anggotanya di pasar. Dengan mengintegrasikan beragam kepentingan, KMP berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat utama dari KMP adalah kemampuannya untuk memperluas akses anggota terhadap modal dan teknologi. Anggota dengan latar belakang ekonomi yang berbeda dapat saling membantu dalam hal pembiayaan dan pengembangan keterampilan. Koperasi dapat menyediakan pelatihan dan akses ke teknologi modern, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam usaha mereka. Ini sangat penting, terutama di daerah

pedesaan yang sering kali kurang mendapat perhatian dari investor besar (Fauzi, 2024).

KMP juga berperan dalam menciptakan pasar lokal yang lebih berkelanjutan. Dengan memprioritaskan produk lokal, koperasi berkontribusi pada peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian dan kerajinan. Dukungan ini tidak hanya menguntungkan petani dan pengrajin tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Ketika masyarakat lebih memilih produk lokal, peredaran uang di dalam komunitas menjadi lebih cepat, yang dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan KMP. Permasalahan seperti kurangnya pemahaman mengenai prinsip koperasi, ketidakpastian pasar, dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait diperlukan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan koperasi. Dengan mengatasi tantangan ini, koperasi dapat berfungsi lebih optimal dalam mendorong perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, KMP memiliki potensi besar untuk memajukan

perekonomian lokal di Indonesia. Melalui kerja sama yang kuat antar anggota dan dukungan dari berbagai pihak, koperasi dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi, KMP dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak komunitas di Indonesia.

3. Peran UMKM dalam Perekonomian

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Selain memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan banyak UMKM yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan mempekerjakan jutaan tenaga kerja. Dengan demikian, UMKM menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan negara (Amanda et al., 2022). Penjelasan tersebut menekankan bahwa UMKM memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian negara. UMKM tidak hanya berkontribusi pada pendapatan negara, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung, karena UMKM dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan sektor-sektor terkait. Selain itu, UMKM turut membantu mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan ekonomi, karena bisnis ini memberikan peluang bagi banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

4. Penerapan Koperasi Multi Pihak dalam Perekonomian Lokal

Contoh penerapan Koperasi Multi Pihak yang berhasil di Indonesia adalah eFishery, startup di sektor perikanan. eFishery telah mengintegrasikan ekosistem bisnisnya dengan model KMP, menyatukan pembudidaya, agen pakan, pembeli, dan pemasok dalam satu entitas koperasi. Langkah ini telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok industri perikanan di Indonesia (Admin, 2024). Model Koperasi Multi Pihak yang diadopsi eFishery memberikan beberapa keuntungan strategis. Dengan menyatukan pembudidaya ikan dan agen pakan dalam satu struktur koperasi, eFishery membantu para petani ikan mendapatkan pakan dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang lebih terjamin. Di sisi lain, koperasi juga memperluas akses pembudidaya ke pasar yang lebih besar melalui hubungan langsung dengan pembeli dan pengecer, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada perantara. Ini tidak hanya menghemat biaya distribusi, tetapi juga membantu meningkatkan margin keuntungan bagi para pembudidaya.

Kesimpulan

Model Koperasi Multi Pihak (KMP) memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong perekonomian lokal di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti konsumen, produsen, pekerja, dan investor, KMP mampu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat solidaritas sosial. Model ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan keberlanjutan ekonomi di tingkat daerah.

Contoh sukses penerapan KMP, seperti yang dilakukan oleh eFishery, memperlihatkan bagaimana koperasi dapat menyatukan berbagai pihak, seperti pembudidaya, agen pakan, dan pemasok, dalam satu entitas yang saling mendukung. Hal ini menghasilkan keuntungan strategis, seperti pengurangan biaya distribusi dan peningkatan margin keuntungan bagi pembudidaya. KMP juga membantu dalam memperluas akses anggota

terhadap modal, teknologi, dan pasar yang lebih besar, sehingga memberdayakan ekonomi lokal, khususnya di daerah pedesaan yang sering terabaikan oleh investor besar.

Meski begitu, penerapan KMP di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pemahaman yang terbatas mengenai prinsip koperasi, ketidakpastian pasar, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting melalui pendidikan, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi. Dengan mengatasi tantangan ini, KMP dapat menjadi solusi yang efektif dalam memajukan perekonomian lokal, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi.

Referensi

- Admin. (2022). *Mengenal Koperasi Multi Pihak*. Fisipol UGM Creative Hub. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2022/04/06/mengenal-koperasi-multi-pihak/>
- Admin. (2024). *Potensi Koperasi Multi Pihak di Indonesia: Pembelajaran dari Praktik dan Modelnya di Dunia*. ADEKMI. <https://adekmi.id/index.php/2024/07/21/potensi-koperasi-multi-pihak-di-indonesia-pembelajaran-dari-praktik-dan-modelnya-di-dunia/>
- Amanda, I. S., Shihabudin, M., Jaya, B. P. M., & Fasyehhudin, M. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.13641>
- Fauzi, M. (2024). *Potensi Koperasi Multi Pihak di Indonesia: Pembelajaran dari Praktik dan Modelnya di Dunia*. PeluangNews. <https://peluangnews.id/potensi-koperasi-multi-pihak-di-indonesia-pembelajaran-dari-praktik-dan-modelnya-di-dunia/amp/>
- Lesmana, M. D. P., & Widyaiswara. (2022). *Koperasi Multipihak Sebagai Alat Penyeimbang Dalam Perjuangan Kelas Bawah*. Pena Pedia. <https://uptdiklatukm.diskopukm.jatimprov.go.id/2022/02/06/koperasi-multipihak-sebagai-alat-penyeimbang-dalam-perjuangan-kelas-bawah/>
- Multi-stakeholder Cooperatives*. (n.d.). UW Center For Cooperatives. <https://uwcc.wisc.edu/resources/multi-stakeholder-cooperatives/>
- Nasution, S., Hidayati, S., & Nasution, P. R. (2024). *As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal*. 3, 522–530. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.160>
- PMKUKM/8/2021, UU/25/1992, UU/39/2008, UU/11/2020, PERPRES/96/2020, & UU/11/2020. (2021). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. *Republik Indonesia*, 1207, 209173.
- Purnamawati, I. G. A. (2020a). *Akuntansi Koperasi & UMKM Teori dan Praktik*.
- Purnamawati, I. G. A. (2020b). *Akuntansi Koperasi & UMKM Teori dan Praktik*.